



JURNAL ILMIAH

ISSN 1858-4144

# MATRIK

Volume2, Nomor 5

Oktober 2010

Sistem Proteksi Penyalahgunaan Internet dengan Router Firewall IPCOP Berbasis Linux dalam Melindungi Jaringan Sekolah.

Raisul Azhar, Ahmadi

Disparitas Gender Penguasaan Dan Ketrampilan Mahasiswa Dalam Pemrograman Komputer

Heroe Santoso, Dyah Susilowati

Sebab "drop-out" Mahasiswa STMIK Bumigora" Mataram

Anthony Anggrawan, Bambang Krismono, Dyah Susilowati

Perancangan dan Pembangunan Aplikasi Enkripsi dan Dekripsi Pesan Pada Mobile Phone Dengan Menggunakan Platform Java 2 Micro Edition

Dian Syafitri, M. Irwan ardiansyah

Penggunaan Perangkat Teknologi Informasi pada Kelas Kuliah Terintegrasi sebagai Perangkat Pembelajaran

Agus Pribadi

Analisa Kebijakan Perluasan Dan Pemerataan Akses Pendidikan Responsif Gender Di Kota Mataram Dan Kabupaten Lombok Barat

Dyah Susilowati, Helna Wardhana, Dian Syafitri

Penggunaan Teknik Decision Tree dalam Aplikasi Data Mining

M. Yunus, Helna Wardhana

SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER

"STMIK" BUMIGORA MATARAM

Jl. Ismail Marzuki Mataram, Telp./Fax. 0370-634498,638369

[www.stmikbumigora.ac.id](http://www.stmikbumigora.ac.id)

# JURNAL MATRIK

Volume 2, Nomor 5

Oktober 2010

## DAFTAR ISI

1. SISTEM PROTEKSI PENYALAHGUNAAN INTERNET DENGAN ROUTER FIREWALL IPCOP BERBASIS LINUX DALAM MELINDUNGI JARINGAN SEKOLAH.  
Raisul Azhar, Ahmadi 1 - 10
2. DISPARITAS GENDER PENGUASAAN DAN KETRAMPILAN MAHASISWA DALAM PEMROGRAMAN KOMPUTER  
Heroe Santoso, Dyah Susilowati 11 - 20
3. SEBAB "DROP-OUT" MAHASISWA STMIK BUMIGORA" MATARAM  
Anthony Anggrawan, Bambang Krismono, Dyah Susilowati 21 - 27
4. PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN APLIKASI ENKRIPSI DAN DEKRIPSI PESAN PADA MOBILE PHONE DENGAN MENGGUNAKAN PLATFORM JAVA 2 MICRO EDITION  
Dian Syafitri, M. Irwan Ardiansyah 28- 41
5. PENGGUNAAN PERANGKAT TEKNOLOGI INFORMASI PADA KELAS KULIAH TERINTEGRASI SEBAGAI PERANGKAT PEMBELAJARAN  
Agus Pribadi 42 - 48
6. ANALISA KEBIJAKAN PERLUASAN DAN PEMERATAAN AKSES PENDIDIKAN RESPONSIF GENDER DI KOTA MATARAM DAN KABUPATEN LOMBOK BARAT  
Dyah Susilowati, Helna Wardhana, Dian Syafitri 49 - 55
7. PENGGUNAAN TEKNIK DECISION TREE DALAM APLIKASI DATA MINING  
M. Yunus, Helna Wardhana 56 - 67

# ANALISA KEBIJAKAN PERLUASAN DAN PEMERATAAN AKSES PENDIDIKAN RESPONSIF GENDER DI KOTA MATARAM DAN KABUPATEN LOMBOK BARAT

Dyah Susilowati, Helna Wardhana, Dian Syafitri  
Teknik Informatika STMIK Bumigora Mataram

## ABSTRAK

*Mereformasi sistem pendidikan agar memberikan kesempatan yang sama kepada semua anak dan menghasilkan warga Negara yang dapat berperan serta secara setara dalam pengembangan masyarakat yang demokratis, tidak diskriminatif dan tidak bias gender merupakan tugas menantang yang dihadapi. Langkah pertama kearah itu adalah dengan memastikan bahwa rencana PUS sensitif gender dan responsif gender, memiliki tujuan yang pasti dan strategi yang sesuai, tersedia dana dan sumber daya manusia yang cukup untuk melaksanakan dan memantau kemajuan dalam pencapaian tujuan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kebijakan perluasan dan pemerataan akses pendidikan di Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat, menganalisa penerapan kebijakan perluasan dan pemerataan akses pendidikan pada level pelaksana di Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat, mengkaji terjadinya disparitas gender, isu kesenjangan gender, serta rekomendasi kebijakan pemerataan dan perluasan akses pendidikan.*

**Kata kunci :** pendidikan, gender, Gender Analysis Pathway (GAP), *Policy Outlook and Plan of Action (POP)*

## 1. LATAR BELAKANG

Pendidikan memegang peranan yang sangat strategis bagi pembentukan sumber daya manusia (SDM) yang produktif, inovatif dan berkepribadian yang sesuai dengan nilai-nilai budaya masyarakat. Pendidikan pada prinsipnya adalah usaha manusia secara sadar untuk meningkatkan kualitas pribadi dengan membina potensi pribadi tersebut yang meliputi rohani maupun jasmani yang selanjutnya berperan mengembangkannya dalam wujud keterampilan dan karya nyata. Tingkat pendidikan seseorang akan mewarnai perannya dalam menentukan nasib serta kesejahteraan hidupnya, dengan demikian dapat dikatakan tingkat pendidikan yang

memadai diharapkan akan mampu mengangkat harkat dan martabat manusia.

*The Beijing Declaration and The Platform for Action 1996 (Gender Education and Development, International Centre of The ILO)* secara tegas menyatakan bahwa : “Pendidikan merupakan hak asasi manusia dan alat penting dalam mencapai kesetaraan, perkembangan dan perdamaian. Pendidikan yang tidak diskriminatif akan menguntungkan baik bagi perempuan maupun laki-laki, yang pada gilirannya akan mempermudah terjadinya kesetaraan (equity) dalam relasi antara perempuan dan laki-laki dewasa pada masyarakat yang lebih luas.”

Penilaian analisis tentang Pendidikan Untuk Semua (PUS) pada tahun 2000 menunjukkan bahwa pengembangan dalam beberapa kasus dengan hasil yang sangat baik telah dilakukan dalam meningkatkan akses pada pendidikan dasar. Walaupun demikian, dalam banyak kasus tidak ada atau sedikit keberhasilan yang dicapai dalam mengurangi kesenjangan gender. Pemerintah sebagai negara dihadapkan pada kekurangberhasilan tersebut pada Forum Pendidikan Dunia di Dakar, Senegal April 2000. Mereka kemudian memutuskan untuk meningkatkan usaha dalam mengatasi kesenjangan dan menyepakati komitmen untuk mencapai kesetaraan gender dalam pendidikan pada tahun 2015. Pada pembukaan Konferensi Dakar, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Kofi Annan menyatakan komitmen kuat PBB untuk upaya ini dengan meluncurkan inisiatif Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pendidikan Anak Perempuan.

Kesepakatan Dakar tentang *Education For All* diarahkan untuk mengatasi kesenjangan gender bidang pendidikan, dimana target yang hendak dicapai antara lain :

1. Menjamin bahwa menjelang tahun 2015 semua anak, khususnya anak perempuan, anak-anak dalam keadaan sulit dan mereka yang termasuk etnik minoritas mempunyai akses pada dan menyelesaikan pendidikan dasar yang bebas dan wajib dengan kualitas yang baik.
2. Mencapai perbaikan 50 % pada tingkat keniraksaraan orang dewasa menjelang tahun 2015, terutama bagi kaum perempuan, dan akses yang adil pada pendidikan dasar dan pendidikan berkelanjutan bagi semua orang dewasa.

3. Penghapusan kesenjangan gender pada pendidikan dasar dan menengah pada tahun 2005 dan pencapaian kesetaraan gender dalam pendidikan pada tahun 2015 dengan fokus pada kepastian akses anak perempuan terhadap pendidikan dasar yang bermutu.

Mereformasi sistem pendidikan agar memberikan kesempatan yang sama kepada semua anak dan menghasilkan warga Negara yang dapat berperan serta secara setara dalam pengembangan masyarakat yang demokratis, tidak diskriminatif dan tidak bias gender merupakan tugas menantang yang dihadapi. Langkah pertama kearah itu adalah dengan memastikan bahwa rencana PUS sensitif gender dan responsif gender, memiliki tujuan yang pasti dan strategi yang sesuai, tersedia dana dan sumber daya manusia yang cukup untuk melaksanakan dan memantau kemajuan dalam pencapaian tujuan tersebut. Kriteria untuk menilai rencana meliputi sejauh mana rencana tersebut responsif gender dan dengan demikian mempengaruhi rekomendasi untuk pendanaan. (Depdiknas, 2004)

Gender memainkan peran sangat penting dalam perjalanan hidup seseorang. Pemilahan peran gender akan berdampak pada perbedaan perlakuan terhadap seseorang. Salah satu perbedaan perlakuan yang terjadi adalah dibidang pendidikan baik pendidikan formal di sekolah maupun pendidikan yang dilakukan orangtua di rumah, yang pada akhirnya menimbulkan perbedaan kesempatan antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh pendidikan. Kurang lengkapnya pengetahuan para perencana dan pengambil keputusan serta pelaksana di bidang pendidikan tentang pendidikan yang berkeadilan gender serta kuatnya budaya "Patriarkhi" masih menjadi kendala yang paling besar bagi

keberhasilan seorang perempuan untuk bertahan dibangku kuliah.

Pada tahun 2005, di bidang pendidikan, kesenjangan gender terlihat dari angka buta huruf perempuan umur 15 tahun ke atas (11 persen) yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki (5 persen). Selain itu, jenjang pendidikan yang ditamatkan perempuan jauh lebih rendah daripada laki-laki. Melalui intensifikasi pelaksanaan kelompok belajar Paket A, Paket B, dan Paket C kesenjangan itu diharapkan semakin sempit; sehingga pada tahun 2006 angka buta huruf perempuan umur 15 tahun ke atas diperkirakan menurun menjadi 10 persen. (Bappenas, 2006)

Rendahnya angka Indeks Pembangunan Gender (*Gender-related Development Index, GDI*) dan angka Indeks Pemberdayaan Gender (*Gender Empowerment Measurement, GEM*). Angka GDI mengukur pencapaian dari dimensi dan indikator yang sama dengan HDI (*Human Development Index*), namun dengan memperhitungkan kesenjangan pencapaian antara perempuan dan laki-laki. GDI adalah HDI yang disesuaikan oleh adanya kesenjangan gender, sehingga selisih yang semakin kecil antara GDI dan HDI menyatakan semakin rendahnya kesenjangan gender. Berdasarkan Indonesia *Humun Development Report 2004*, angka HDI 65,8 dan angka GDI 59,2. Tingginya angka HDI dibandingkan dengan angka GDI menunjukkan, bahwa keberhasilan pembangunan sumberdaya manusia secara keseluruhan belum sepenuhnya diikuti dengan keberhasilan pembangunan gender, atau masih terdapat kesenjangan gender. Ukuran lain dalam pembangunan pemberdayaan perempuan adalah GEM, yang menitikberatkan pada partisipasi, dengan cara mengukur ketimpangan gender di bidang ekonomi (perempuan dalam angkatan kerja dan rata-rata upah di sektor

non-pertanian), politik (perempuan di parlemen) dan pengambilan keputusan (perempuan pekerja profesional, pejabat tinggi, dan manajer). Angka GEM Indonesia pada tahun 2002 adalah 54,6, yaitu ranking ke-33 dari 71 negara yang diukur. Posisi ini lebih baik dibandingkan dengan negara-negara Filipina, Malaysia, Jepang, dan Thailand. (Bappenas, 2006).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Peranan Wanita Universitas Mataram menemukan bahwa kebijakan pendidikan di Nusa Tenggara Barat (NTB), maupun di masing-masing kota/kabupaten yang meliputi : Perluasan kesempatan belajar, Peningkatan Mutu dan Relevansi maupun Manajemen Kelembagaan masih netral gender. Selain itu juga ditemukan kebijakan sekolah terkait perluasan dan pemerataan akses yaitu pemberian beasiswa yang masih netral gender. (Cahyowati dkk, 2004) Mengingat kebijakan adalah dasar pelaksanaan semua program pendidikan, temuan adanya keenganan para pengambil keputusan untuk mencantumkan istilah gender, menjadi persoalan serius yang harus segera diselesaikan.

Khususnya pada pokok permasalahan perluasan dan pemerataan pendidikan juga ditemukan adanya faktor kendala lokasi, geografis, dan ekonomi yang menjadi penyebab tingginya angka putus sekolah. Dilain fihak, berdasarkan survey awal dapat diketahui adanya pendirian beberapa Sekolah Dasar (SD) Fillial yang diprakarsai oleh masyarakat di kecamatan Gunung sari, kabupaten Lombok Barat. Hal ini sebenarnya menunjukkan adanya motivasi atau kesadaran masyarakat miskin akan pentingnya pendidikan. Namun, ironisnya SD Fillial tersebut kurang mendapat perhatian dari pengambil kebijakan pendidikan.

Dari persoalan-persoalan tersebut, sangatlah penting dilakukan kajian

mendalam untuk menemukan akar permasalahan terkait kebijakan perluasan dan pemerataan pendidikan yang responsif gender di kota Mataram dan kabupaten Lombok Barat Propinsi Nusa Tenggara Barat.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. PENGERTIAN GENDER

Menurut Ann Oakley, gender adalah masalah budaya, ia merujuk kepada klasifikasi sosial dari laki-laki dan perempuan menjadi maskulin dan feminin. (Bashin, 2001). Sedangkan definisi lain menyatakan gender adalah seperangkat peran yang, menyampaikan kepada orang lain bahwa kita feminin atau maskulin (Moose, 1996). Konsep gender adalah sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh faktor-faktor sosial maupun budaya, sehingga lahir beberapa anggapan tentang peran sosial dan budaya laki-laki dan perempuan. (Handayani, 2002).

### 2.2. PENGARUSUTAMAAN GENDER DI BIDANG PENDIDIKAN

Program Gender Mainstreaming tertuang dalam Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 yang antara lain mengemukakan hal-hal penting sebagai berikut :

1. Agar setiap instansi pemerintah mengintegrasikan program pemberdayaan perempuan ke dalam program sektor dan daerah masing-masing.
2. Untuk itu dapat dipergunakan pedoman teknis yang disusun oleh Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan sebagai acuan.
3. Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan bertugas memberikan fasilitas dan bantuan

bagi instansi dan daerah yang memerlukan, bekerjasama dengan lembaga-lembaga swadaya masyarakat dan perguruan tinggi yang ada.

4. Sesuai fungsi dan wewenangnya setiap instansi dan daerah dapat mengembangkan lebih lanjut pelaksanaan Inpres ini kepada masyarakat.

Pendekatan Gender Mainstreaming telah dilakukan di dalam kebijakan dan program pembangunan, termasuk pendidikan. Gender Mainstreaming mereformulasi kebijakan agar semakin responsif gender, termasuk perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi. Teknik analisisnya menggunakan GAP (*Gender Analysis Pathway*) yang telah dikembangkan oleh Direktorat Kependudukan, Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan Perempuan Bappenas yang bekerja sama dengan Women's Support Project Phase II-CDA dan ILO.

## 3. METODE PENELITIAN

### 3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif analitis dengan metode survey secara kualitatif maupun kuantitatif, yaitu metode penelitian yang menggunakan kuisioner dan daftar pertanyaan yang ditujukan kepada responden.

### 3.2. Lokasi Penelitian dan Objek Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan dengan *purposive sampling*, yaitu dengan dasar pertimbangan pemilihan daerah/kota/kabupaten di Nusa Tenggara Barat yang mempunyai tingkat kesenjangan gender tertinggi di wilayah NTB

berdasarkan GDI tahun 1999. Berdasarkan data tersebut ditetapkan lokasi penelitian di Kota Mataram, dan Kabupaten Lombok Barat, dengan dasar pertimbangan karena kota Mataram merupakan ibu kota propinsi Nusa Tenggara Barat dengan *Gender Development Indek (GDI)* berada pada peringkat I dan Kabupaten Lombok Barat yang memiliki angka rata-rata lama sekolah anak perempuan paling rendah di Pulau Lombok. (Cahyowati dkk, 2004). Selanjutnya dari masing-masing kota/kabupaten tersebut akan ditentukan sejumlah sekolah Negeri dan Swasta yang dijadikan sampel penelitian sebanyak 10 % dari total Sekolah Dasar dan 10 % dari Sekolah Menengah Pertama dan 10 % dari total Sekolah Menengah Atas

### 3.3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan instrumen penelitian yaitu:

#### 3.3.1. Kuisisioner

Kuisisioner yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk pertanyaan tertutup dan terbuka. Kuisisioner tersebut diedarkan pada Pengambil kebijakan pendidikan (Kepala Dinas Pendidikan), pelaksana kebijakan/program (kepala sekolah, guru)

#### 3.3.2. Wawancara

Dari wawancara yang dilakukan secara langsung pada responden diperoleh data tentang alasan-alasan yang terkait dengan jawaban yang ada di kuisisioner.

#### 3.3.3. Studi Dokumen

Dari studi dokumen kebijakan (renstra dan Repetada), studi Sistem Informasi Manajemen Pendidikan dan data statistik dari Biro Pusat Statistik.

### 3.4. ANALISIS DATA

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Gender Analysis Pathway (GAP) dan Policy Outlook and Plan of Action (POP)*. Dokumen kebijakan dan data pembuka wawasan yang telah dikumpulkan akan dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut :

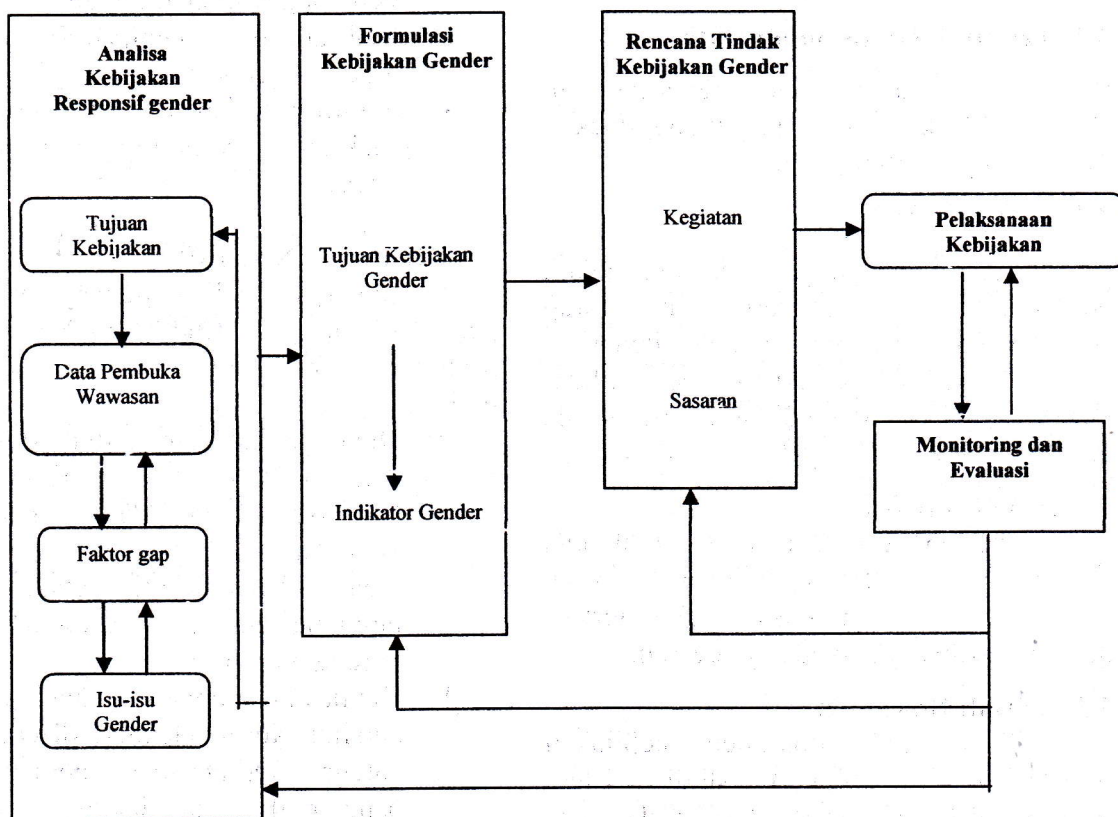
1. Analisis kebijakan umum tentang perluasan dan pemerataan akses pendidikan yang responsif gender ( Identifikasi tujuan, dan sasaran, analisa data pembuka wawasan, kesenjangan gender, isu gender)
2. Merumuskan kembali kebijakan yang responsif gender, alternatif kebijakan, tujuan kebijakan dan indikator gender
3. Rencana Tindak Lanjut/Rencana Aksi yang responsif gender.
4. Pelaksanaan kebijakan yang responsif gender.
5. Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan program yang responsif gender.

### 4. HASIL ANALISIS

Penerapan kebijakan pemerataan dan perluasan akses pendidikan di Kota Mataram dan Lombok Barat sebagai berikut :

- a. Dinas Pendidikan Kota Mataram dan Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Barat telah memiliki kebijakan yang menekankan pada peningkatan daya tampung dan beasiswa untuk siswa kurang mampu.
- b. Kebijakan yang tertuang dalam bersifat Netral Gender, disebabkan karena terbatasnya pemahaman pengambil kebijakan tentang perencanaan program responsif gender.
- c. Partisipasi penduduk usia sekolah pada Sekolah Dasar sudah bagus,

- d. namun semakin terus menurun pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi (SMP, SMA).
- e. Rata-rata angka putus sekolah DO terjadi peningkatan pada setiap jenjang pendidikan. Pada tingkat SD 47% sekolah memiliki 1-5% angka putus sekolah. Pada tingkat SMP 63% SMP memiliki 1-5% angka putus sekolah. Pada tingkat SMA 67% SMA memiliki 1-5% angka putus sekolah.
- f. Pada tingkat SMP, 50% sekolah menyatakan angka rawan putus sekolah terjadi pada saat Kelas 8 ke Kelas 9. Sedangkan pada tingkat SMA 67% sekolah menyatakan angka rawan putus sekolah terjadi pada saat Kelas 10 ke Kelas 11.
- g. Faktor-faktor yang menjadi penyebab kesenjangan gender adalah faktor lokasi geografis, ekonomi, motivasi, kemampuan intelegensi dan sosial budaya. Faktor ekonomi menjadi factor yang paling dominan penyebab siswa putus sekolah di semua tingkat dan faktor dominant berikutnya adalah faktor motivasi.
- h. Pelaksanaan SPDT di kabupaten Lombok Barat dapat menjadi percontohan untuk diterapkan di tempat lain dalam upaya peningkatan partisipasi sekolah.



Gambar 1. Gender Analysis Pathway (GAP) dan Policy Outlook and Plan of Action (POP)



## 5. PENUTUP

Berdasarkan analisa tersebut diatas dapat disusun rekomendasi sebagai berikut :

1. Reformulasi sasaran program yang responsive gender dengan memperhatikan proporsi laki-laki dan perempuan serta memperhatikan lokasi, geografis, ekonomi dan budaya lokal.
2. Melaksanakan sosialisasi PUG untuk penentu kebijakan, pelaksana kebijakan dan penyusun program secara rutin oleh Tim pusat untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya penyusunan kebijakan/program yang responsif gender.
3. Membangun database profil gender Pendidikan pada Dinas Pendidikan kota Mataram dan kabupaten Lombok Barat dengan menggunakan data terpilah (laki-laki dan perempuan) sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan yang responsive gender.
4. Penyusunan buku panduan penyusunan rencana program yang responsive gender oleh Depdiknas Pusat yang harus dipedomani oleh seluruh Dinas Pendidikan dalam penyusunan program.
5. Selain hal tersebut pembukaan program SPDT tetap harus diiringi dengan pemenuhan jumlah guru mata pelajaran agar kualitas pendidikan tetap terjaga.
6. Mengadakan program penyadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan melalui media yang menarik (Film, Radio, Slogan-slogan)

## PUSTAKA

- Anonim, 2004. *Pendidikan Untuk Semua (PUS) Pedoman Untuk Menyiapkan Rencana PUS Yang Responsif Gender*. Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda, Direktorat Pendidikan Masyarakat.
- Anonim, 2004. *Bahan Informasi Pengarusutamaan Gender, Panduan Perencanaan Berperspektif Gender*. Edisi 2. Bagian Kesra dan Pemberdayaan Perempuan Setda Kabupaten Lombok Barat.
- Bashin Kamla, 2001, *Memahami Gender*, Templok Press, Jakarta.
- Cahyawati, Sri Supartiningsih, Ruth Stella, Hanartani, 2004. *Studi Lanjutan Analisis Kebijakan Pendidikan Berwawasan Gender di Provinsi Nusa Tenggara Barat*. Laporan Penelitian. Pusat Penelitian Peranan Wanita, Universitas Mataram, NTB.
- Handayani Trisakti & Sugiarti, November 2002, *Konsep Dan Teknik Penelitian Gender*, Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang.
- Lombok Barat Dalam Angka, 2005
- Mataram Dalam Angka, 2005
- Moose Julia Cleves, 1996, *Gender dan Pembangunan*. Rifka Annisa Women's Crisis Centre bekerja sama dengan Pustaka Pelajar
- Rencana Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan, 2004, <http://www.bappenas.go.id>



**SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER  
"STMIK" BUMIGORA MATARAM**

Jl. Ismail Marzuki Mataram, Telp/Fax. 0370-634498,638369  
[www.stmikbumigora.ac.id](http://www.stmikbumigora.ac.id)

**ISSN 1858-4144**



[www.stmikbumigora.ac.id](http://www.stmikbumigora.ac.id)

Digital Library STM